

## OPTIMALISASI PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD-RI) DALAM PENYUSUNAN APBD MELALUI PENDAMPINGAN TEKNIS PADA BPKAD KABUPATEN BUTON TENGAH

**Muhammad Iqbal<sup>1</sup>, Jaeni<sup>2</sup>, Pancawati Hardiningsih<sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Pendidikan Profesi Akuntan, Universitas Stikubank

Email: [muhammadiqbal0026@mhs.unisbank.ac.id](mailto:muhammadiqbal0026@mhs.unisbank.ac.id), [jaeni@edu.unisbank.ac.id](mailto:jaeni@edu.unisbank.ac.id),  
[pancawati@edu.unisbank.ac.id](mailto:pancawati@edu.unisbank.ac.id)

### **Abstrak**

*Kegiatan pendampingan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton Tengah. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi keterbatasan pemahaman teknis operator, variasi kompetensi antar perangkat daerah, kendala akses sistem akibat jaringan dan server pusat, serta belum optimalnya keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD–KUA/PPAS–RKA). Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan pendampingan partisipatif, meliputi analisis kebutuhan, penyusunan modul ringkas dan checklist verifikasi, coaching serta praktik langsung penginputan program/kegiatan/subkegiatan, penyusunan indikator output/outcome, pemilihan akun belanja, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman operator terhadap alur kerja SIPD-RI, perbaikan ketepatan pemilihan akun belanja, peningkatan kualitas indikator kinerja agar lebih terukur, serta membaiknya koordinasi antara BPKAD dan OPD sehingga revisi dokumen RKA berkurang dan kepatuhan jadwal meningkat. Kegiatan menghasilkan luaran berupa modul penggunaan SIPD-RI, checklist verifikasi RKA, serta rekomendasi pembentukan helpdesk internal dan pelatihan berkala. Pendampingan ini berkontribusi pada penguatan tata kelola penganggaran daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.*

**Kata kunci:** SIPD-RI, APBD, pendampingan teknis, penganggaran daerah, keuangan daerah.

### **Abstract**

*This mentoring activity aims to improve the capacity of local government officials in utilizing the Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD-RI) in the process of preparing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) at the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKAD) of Central Buton Regency. The main problems faced by partners include limited technical understanding of operators, variations in competency between regional devices, system access constraints due to the network and central server, and the suboptimal integration of planning and budgeting documents (RKPD–KUA/PPAS–RKA). The implementation method is carried out through a participatory mentoring approach, including needs analysis, preparation of concise modules and verification checklists, coaching and direct practice of inputting programs/activities/sub-activities, preparation of output/outcome indicators, selection of spending accounts, and monitoring and evaluation. The results of the activity show an increase in operator understanding of the SIPD-RI workflow, improved accuracy of spending account selection, improved quality of performance indicators to be more measurable, and improved coordination between BPKAD and OPDs so that RKA document revisions are reduced and schedule compliance is increased. The activities produced outputs in the form of a SIPD-RI usage module, a RKA verification checklist, and recommendations for the establishment of an internal helpdesk and regular training. This mentoring contributed to strengthening regional budget governance to be more transparent, effective, and accountable.*

**Keywords:** SIPD-RI, APBD, technical assistance, regional budgeting, regional finance

## 1. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan daerah menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah (Mahi & Trigunarso, 2017; Sinurat & Panjaitan, 2017). Salah satu instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik (Ismail & Enceng, 2019).

Pelaksanaan otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah mampu menyusun APBD secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2019, 2020). Namun, proses penyusunan APBD merupakan tahapan yang kompleks karena melibatkan banyak perangkat daerah dan menuntut integrasi dokumen perencanaan serta penganggaran.

Sebagai bentuk penguatan digitalisasi pengelolaan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). SIPD-RI dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara nasional (Inzany et al., 2022; Sudianing & Seputra, 2019). Implementasi SIPD-RI diharapkan dapat meminimalkan kesalahan administrasi, meningkatkan kualitas dokumen penganggaran, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran (Afifah et al., 2023; Pesak et al., 2021).

Dalam praktiknya, implementasi SIPD-RI di sejumlah daerah masih menghadapi kendala, baik teknis maupun non-teknis. Permasalahan yang umum terjadi antara lain keterbatasan kemampuan operator, variasi pemahaman antar perangkat daerah, gangguan server pusat, keterbatasan jaringan internet, serta perubahan fitur sistem yang membutuhkan penyesuaian berkelanjutan (Amanah, 2018; Pesak et al., 2021). Kondisi ini juga dialami oleh BPKAD Kabupaten Buton Tengah sebagai instansi yang berperan strategis dalam proses penyusunan APBD.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum optimalnya keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam beberapa kasus, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan KUA-PPAS. Hal ini ditandai dengan indikator kinerja yang masih bersifat administratif, subkegiatan yang belum selaras dengan tujuan program, serta alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja (Mahi & Trigunarso, 2017; Sudianing & Seputra, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pendampingan teknis untuk memperkuat kapasitas aparatur serta mendukung optimalisasi penggunaan SIPD-RI. Pendampingan ini bertujuan membantu operator memahami alur kerja SIPD-RI, meningkatkan ketepatan pemilihan akun belanja, menyusun indikator output/outcome yang lebih terukur, serta memperkuat koordinasi antara BPKAD dan OPD. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyusunan APBD serta mendukung tata kelola penganggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

## 2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sasaran kegiatan adalah aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan APBD melalui SIPD-RI, meliputi staf Bidang Anggaran BPKAD serta operator SIPD-RI dari perangkat daerah (OPD).

Pendekatan yang digunakan adalah pendampingan partisipatif (*participatory assistance*), yaitu proses pendampingan dilakukan bersama mitra dengan mengutamakan keterlibatan aktif aparatur

melalui praktik langsung dan pemecahan masalah berbasis kasus yang terjadi pada proses input dan verifikasi RKA.

Pelaksanaan kegiatan dirancang mengikuti siklus penyusunan APBD dan dibagi menjadi lima tahap utama, yaitu: 1) Analisis kebutuhan dan pemetaan masalah melalui wawancara terarah, observasi alur kerja input SIPD-RI, serta telaah dokumen (RKPD, KUA-PPAS, dan RKA); 2) Penyusunan perangkat pendampingan berupa modul ringkas penggunaan SIPD-RI, panduan teknis (quick guide), serta checklist verifikasi dokumen RKA berbasis SIPD; 3) Pelaksanaan pendampingan teknis melalui coaching, clinic session, dan praktik langsung penginputan program/kegiatan/subkegiatan, penyusunan indikator kinerja, serta pemilihan akun belanja; 4) Monitoring dan evaluasi melalui pengamatan perubahan proses kerja, rekapitulasi temuan kesalahan input, serta diskusi evaluasi bersama mitra; dan 5) Rencana keberlanjutan program melalui rekomendasi pelatihan berkala, pembentukan helpdesk internal, penyusunan SOP ringkas, dan penguatan infrastruktur jaringan.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan pemahaman operator terhadap alur kerja SIPD-RI, penurunan kesalahan pemilihan akun belanja dan struktur kegiatan, peningkatan kualitas indikator kinerja, serta meningkatnya koordinasi antara BPKAD dan OPD dalam proses penyusunan dan verifikasi RKA.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada fase penyusunan dan verifikasi RKA perangkat daerah. Pelaksanaan berjalan sesuai tahapan yang direncanakan dengan tingkat partisipasi yang baik dari aparatur BPKAD maupun operator OPD. Antusiasme peserta terlihat terutama pada sesi praktik langsung, karena permasalahan dominan bersifat teknis-operasional dan memerlukan solusi langsung pada aplikasi SIPD-RI.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan implementasi SIPD-RI tidak hanya terkait kendala sistem, namun juga berkaitan dengan pemahaman konsep penganggaran berbasis kinerja, ketepatan penyusunan indikator output/outcome, konsistensi dokumen perencanaan–penganggaran, serta manajemen waktu input dan verifikasi (Sinurat & Panjaitan, 2017).

#### **Temuan Awal (Analisis Kebutuhan)**

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Temuan utama yang diidentifikasi meliputi: a) Variasi kemampuan operator. Operator SIPD-RI antar perangkat daerah memiliki tingkat kompetensi yang tidak merata. Operator berpengalaman lebih cepat dalam proses input, sedangkan operator baru mengalami kesulitan memahami alur SIPD-RI, memilih akun belanja, serta menyusun indikator kinerja yang terukur. b) Permasalahan teknis sistem. Kendala yang sering muncul adalah akses sistem lambat pada jam sibuk, pembaruan fitur tanpa sosialisasi teknis yang memadai, serta gangguan server pusat menjelang batas akhir penginputan. c) Keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran (Pesak et al., 2021; Sudianing & Seputra, 2019). Ditemukan bahwa sebagian RKA belum sepenuhnya mencerminkan keselarasan dengan RKPD dan KUA-PPAS, serta masih terdapat indikator yang bersifat administratif dan belum terukur.



Gambar 1. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Th. 2026 dengan Aplikasi SIPD-RI

### Hasil Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis dilakukan melalui *coaching*, praktik langsung, serta *clinic session* yang menekankan pemecahan masalah berdasarkan kasus nyata pada proses input dan verifikasi. Hasil yang diperoleh dapat dirangkum sebagai berikut: a) Peningkatan pemahaman operasional SIPD-RI. Operator menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyusun struktur program–kegiatan–subkegiatan sesuai regulasi, menetapkan indikator output yang relevan, serta melakukan input dan penyesuaian akun belanja. Kesalahan klasifikasi belanja berkurang karena operator mulai memahami prinsip dasar pemetaan akun. b) Perbaikan kualitas penyusunan RKA. Dokumen RKA yang diinput dalam SIPD-RI mengalami perbaikan pada aspek keterukuran indikator, keselarasan subkegiatan dengan tujuan program, serta rasionalitas alokasi anggaran. Hal ini memperkuat orientasi penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan proses verifikasi oleh BPKAD (Mahi & Trigunarso, 2017). c) Penguatan koordinasi BPKAD dan OPD. Clinic session dan diskusi teknis mendorong komunikasi yang lebih intensif. Proses klarifikasi data menjadi lebih cepat, revisi RKA dapat dilakukan segera, dan informasi perubahan sistem dapat dikomunikasikan lebih efektif. Koordinasi yang sebelumnya reaktif menjadi lebih proaktif melalui kanal komunikasi teknis yang lebih terbuka.

### Dampak terhadap Kepatuhan Jadwal Penganggaran

Kegiatan pendampingan memberikan dampak terhadap manajemen waktu input dan verifikasi. Sebelum pendampingan, banyak OPD melakukan input mendekati batas waktu sehingga terjadi penumpukan perbaikan pada akhir periode. Setelah pendampingan, operator lebih memahami tahapan dan jadwal penganggaran sehingga proses input dapat dilakukan lebih terencana. Meskipun gangguan server pusat masih terjadi, kesiapan SDM meningkat dan revisi pada tahap akhir berkurang.



Gambar 2. Koordinasi Jadwal Penganggaran

Tahap	Sub Tahap	Status	Jadwal Mulai	Jadwal Selesai	Aksi
Penetapan APBD	Penetapan APBD TA 2025	Selesai dan Dikunci	01/01/2025 9:50	06/01/2025 21:04	[Icons]
Penyusunan Hasil Evaluasi RAPBD	Evaluasi RAPBD TA 2025	Selesai dan Dikunci	01/10/2025 7:35	06/01/2025 20:51	[Icons]
RAPBD	Pembahasan dan Penetapan RAPBD	Selesai dan Dikunci	25/11/2025 16:22	01/12/2025 9:24	[Icons]
RAPBD	Penyusunan RKA	Selesai dan Dikunci	25/11/2025 10:58	26/11/2025 15:01	[Icons]
Penetapan KUA-PPAS	Penetapan KUA-PPAS TA 2025	Selesai dan Dikunci	25/11/2025 11:51	26/11/2025 10:57	[Icons]
KUA dan PPAS	Pembahasan KUA-PPAS TA 2025	Selesai dan Dikunci	12/11/2025 9:57	26/11/2025 7:37	[Icons]
KUA dan PPAS	Penyusunan KUA-PPAS	Selesai dan Dikunci	04/11/2025 8:34	11/11/2025 17:08	[Icons]

Gambar 3. Jadwal Penganggaran SIPD

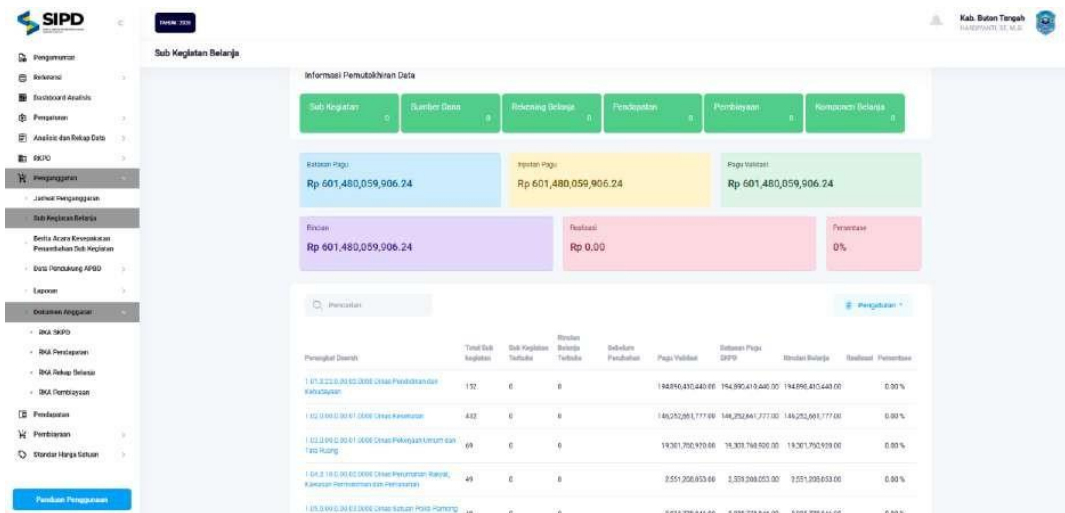
## Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung kegiatan meliputi komitmen pimpinan BPKAD, keterbukaan aparatur terhadap pembelajaran teknis, serta ketersediaan perangkat kerja dasar. Faktor penghambat yang masih dominan adalah ketergantungan pada server pusat SIPD-RI, variasi kompetensi SDM antar perangkat daerah, perubahan fitur sistem yang memerlukan adaptasi cepat, serta keterbatasan jaringan internet pada jam akses bersamaan.

## Pembahasan dalam Perspektif Tata Kelola Keuangan Daerah

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa SIPD-RI memiliki potensi besar mendukung transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta integrasi perencanaan–penganggaran (Afifah et al., 2023; Inzany et al., 2022). Namun, teknologi tidak otomatis menjamin kualitas penganggaran apabila kapasitas SDM, konsistensi penerapan regulasi, dan koordinasi lintas OPD belum memadai (Sudianing & Seputra,

2019). Pendampingan teknis berperan sebagai strategi untuk menjembatani kesenjangan antara ketersediaan sistem digital dan kesiapan pengguna.



Gambar 4. Kegiatan Belanja SIPD

### Analisis dengan Teori Implementasi Kebijakan Edward III

Hasil kegiatan dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks SIPD-RI, pendampingan memperkuat komunikasi teknis antara BPKAD dan OPD, meningkatkan kapasitas SDM sebagai sumber daya utama, membangun disposisi positif aparatur dalam beradaptasi dengan sistem, serta mendorong kebutuhan penguatan struktur birokrasi melalui SOP dan *helpdesk* internal.

### 4. DAMPAK KEGIATAN

Dampak kegiatan pendampingan mencakup peningkatan kapasitas teknis aparatur, pengurangan kesalahan input anggaran, serta penguatan koordinasi antara BPKAD dan perangkat daerah. Dampak langsung terlihat pada kemampuan operator dalam memahami alur kerja SIPD-RI, meningkatkan ketepatan pemilihan akun belanja, dan menyusun indikator kinerja yang lebih terukur. Dampak penguatan sistem terlihat dari menurunnya revisi berulang dokumen RKA, meningkatnya kepatuhan jadwal penganggaran, serta meningkatnya efektivitas komunikasi teknis lintas OPD.

### 5. KEBERLANJUTAN PROGRAM

Agar manfaat program dapat berkelanjutan, diperlukan strategi lanjutan yang realistis dan dapat diadopsi mitra. Keberlanjutan program direkomendasikan melalui: (1) pelatihan berkala SIPD-RI pada awal siklus APBD dan menjelang tahap revisi/verifikasi; (2) pembentukan *helpdesk* internal SIPD-RI di BPKAD; (3) penyusunan SOP ringkas input dan verifikasi RKA; (4) pembuatan bank FAQ/dokumentasi masalah teknis; serta (5) peningkatan infrastruktur jaringan dan kesiapan perangkat kerja untuk mengurangi hambatan akses.

## 6. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan optimalisasi pemanfaatan SIPD-RI pada BPKAD Kabupaten Buton Tengah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penyusunan APBD. Pendampingan berbasis praktik langsung terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan operator dalam memahami alur kerja SIPD-RI, memperbaiki ketepatan pemilihan akun belanja, serta meningkatkan kualitas penyusunan indikator kinerja agar lebih terukur. Selain peningkatan kompetensi SDM, kegiatan ini berdampak pada perbaikan tata kelola proses penganggaran melalui meningkatnya efektivitas koordinasi BPKAD dan OPD, berkurangnya revisi dokumen RKA, serta membaiknya kepatuhan jadwal penginputan dan verifikasi. Namun demikian, tantangan eksternal seperti gangguan server pusat dan keterbatasan jaringan masih perlu ditangani melalui penguatan infrastruktur, pelatihan berkala, pembentukan helpdesk internal, serta standardisasi prosedur kerja agar manfaat program dapat berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Elen Puspitasari, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang
2. Bapak Dr. Drs. Agus Budi Santosa, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Pancawati Hardiningsih, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA., CSRA, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi yang bersedia membimbing dan memberikan masukan kepada saya dalam menyusun laporan magang ini.
4. Bapak Jaeni, SE, M.Si, Ak, CA., CBV, CMA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan laporan magang ini.
5. Ibu Hardyanti, SE., M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Tengah yang telah memberikan izin kepada praktikan untuk melaksanakan magang dan membuat laporan magang ini.
6. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada istri tercinta Safina Julianti Ramlin, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kesabaran, serta motivasi tanpa henti kepada penulis. Kehadiran dan pengorbanannya menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.
7. Keluarga dan teman-teman sekalian yang sudah mendukung dan mendoakan praktikan dalam penyusunan Laporan Magang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., Subarno, A., & Akbarini, N. R. (2023). Implementasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, 7(2), 55–61. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>
- Amanah, N. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembangunan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.
- Driyantini, E., Wulandari, E., & Vanesha, A. F. (2022). Pengaruh Cinta Uang terhadap Keterikatan Kerja di Lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Khatulistiwa Profesional*, 3(1), 85–95. <https://doi.org/10.62099/khapro.v3i1.23>
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwanto, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah. 2(10), 3573–3588.
- Ismail, T., & Enceng. (2019). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Edisi 4). Penerbit Universitas Terbuka.
- Mahi, A. K., & Trigunarso, S. I. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah : Teori dan Aplikasi (Edisi Pert). Kencana.
- Nataniel, D., & Hatta, H. R. (2019). Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser. 4(1). 47-54 Pemerintahan Daerah Kota Manado. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/31423>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pesak, P. J., Maradesa, N. C., Eyne, A., Gazali, A., & Salindeho, A. (2021). Analysis of Local Government Information System (SIPD) Implementation at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Bitung City Government. 8.
- Sinurat, M., & Panjaitan, H. M. (2017). Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Agus Haidar (ed.); Cetakan Pe).
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 1–22.
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi